

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Nama : Wahyu Ismail
Npm : 1621020057
Jurusan : Siyasah Syar'iyah**



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Nama : Wahyu Ismail
Npm : 1621020057
Jurusan : Siyasah Syar'iyah**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., MH

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020M**

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Kampung sebagai alat untuk proses pergantian pemerintahan kampung sekaligus menjadi pesta demokrasi di tingkat wilayah kampung, tidak jarang diwarnai oleh konflik dan pertentangan diantara masyarakat kampung, baik konflik individu ataupun konflik sosial. Seperti di ketahui masyarakat kampung adalah masyarakat yang masih terikat dengan hubungan kekerabatan serta adat istiadat. Halnya ini terjadi di Kampung Bumi Ratu yang berada di Kabupaten Lampung Tengah dikenal masih sangat homogen yang mana hanya terdapat adat Lampung dan didominasi oleh masyarakat beragama Islam. Dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan yang mereka junjung tinggi selama ini harus bersinggungan dengan kepentingan politik. Ketika masyarakat yang menjunjung tinggi kekeluargaannya bersinggung dengan pemilihan kepala kampung maka keduanya saling bertentangan hingga menimbulkan dinamika sosial. Apabila dalam kehidupan masyarakat yang masih ada masyarakat pribuminya, mereka bisa membuat sebuah peraturan dengan sendirinya yang dalam pemilihan Kepala Kampung harus berasal dari masyarakat pribumi itu sendiri. Pemilihan kepala kampung adalah suatu keharusan bagi masyarakat guna untuk memimpin kampung kearah yang lebih baik, bahkan Islam mewajibkan untuk mengangkat pemimpin agar masyarakat sejahtera dunia dan akhirat. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 diterbitkan untuk menjadi sebuah pedoman dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan Daerah tersebut terdiri dari lima bab dan berisikan 56 pasal. Permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu 1. Bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan 2. Bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui sejauh mungkin tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Fiqh Siyasah. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diteukan bahwa 1. Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu yang berlangsung pada tahun 2018 secara keseluruhan proses pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 tahun 2015 dan 2. Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu sudah sesuai dengan fiqh siyasah. Baik itu dari tahap penjangkaran, penyaringan, penetapan calon, pada saat kampanye, pada saat pemungutan suara dan pada saat penetapan calon terpilih sudah sangat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Kampung dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa :

Nama : **Wahyu Ismail**

TTL : Buyut Udik, 13 April 1998

NPM : 1621020057

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Mei 2019

Wahyu Ismail
NPM. 1621020057



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu
Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Wahyu Ismail

NPM : 1621020057

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP. 195512251985031002

Agustina Nurhavari, S.Ag., MH.
NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah,

Frengki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh : **Wahyu Ismail**,
NPM : **1621020057**, program studi **Siyasah Syar'iyah**, Telah di ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada
Hari/Tanggal : **Selasa, 11 Februari 2020.**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. H. Khairuddin, M.H.**

Sekretaris : **Rudi Santoso, M.H.I., M.H.**

Penguji I : **Dra. Firdaweri, M.H.I.**

Penguji II : **Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

Penguji III : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NPM : 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS. An Nisa (4) :59)



PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini aku persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Buyah (Karnain) dan Emak (Apiyanti) yang telah membesarkan Wahyu sejak waktu kecil bahkan dari alam Rahim yang penuh rasa sayang dan cinta tanpa adanya rasa letih dan lelah, berkat dari doa dan dukungan dari Buyah dan Emak Wahyu bisa menyelesaikan skripsi dan kuliah Wahyu tepat pada waktunya. Skripsi dan kelulusan Wahyu disempahkan buat hadiah terindah di hari lahirnya Buyah dan Emak.
2. Buat para adik-adik ku Wildan Al Haikan dan Mutia Al Vanie kalian adalah salah satu semangatku untuk segera menyelesaikan kuliah dan skripsi tepat pada waktunya.
3. Buat para keponakanku yang ada di Bani Wahhab dan keponakan dari pihak Buyah terkhusus Siti, Sidi, Yayik dan Nyayik
4. Buat Dati, Walit, Mimi, Umi, Pakcik, Jeddi dan Jeddah.
5. Buat kawan-kawan ku Hukum Tata Negara Kelas B 2016.
6. Buat kalian Khongguan Family yang selalu mensupport jalannya pengerjaan skripsi ini cepet nyusul ya.
7. Almamaterku tercinta Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu dan menyelesaikan study k

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat taufik, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawa beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa hambanya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)” diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi berbagai macam hambatan dan rintangan yang ada, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka penulis tidak bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih secara tulus kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Bapak Prof. Dr. Hi. Muhammad Mukri, M.Ag. yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Raden Intan Lampung lebih baik lagi dan membawa banyak perubahan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Dr. Hi. Khairuddin, M.H.
3. Kepala Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 yang selalu mendukung dan mensupport untuk segera menyelesaikan studi dengan waktu tepat.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., MH. Selaku pembimbing 2 yang selalu memberi dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Bapak Ibu dosen beserta staff akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang sudah memberikan pelayanan berupa pemberian data kepada penulis untuk memudahkan mengerjakan skripsi ini.

8. Kepada Ami Heri yang sudah membantu dan sudah mau direpotkan untuk bertemu kiyay dan Kepala Kampung Bumi Ratu
9. Kepada semua teman-teman Siyasah 2016 kelas B Okta, Nindy, Mutia, Peni, Saras, Sucinadia, Sudirman, Andi, Soni, Dapri dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang sudah mau menemani dan mendengarkan keluh kesah saat pengerjaan skripsi ini dan yang selalu memberikan semangat.
10. Buat para kawan-kawan Siyasah 2016 yang sudah mau berproses dan belajar bersama.
11. Buat para keluarga yang sudah mendukung penulis buat Dati, Walit, Mimi, Umi Din, Pakcik Din yang sudah mau mengajarkan artinya kehidupan yang sangat banyak sandiwaranya, terima kasih sudah mau menerima dan mendidik.
12. Buat para keluarga besar dari Emak dan Buyah Alhamdulillah Skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktunya dan doakan cepet dapet kerjaan ya.
13. Buat para kawan-kawan organisasi buat PIK Sahabat khusus buat Ketua Umum, Sekertaris Umum, Bendahara Umum, Kabid, sekbid, kasubbid dan adik-adik PIK Sahabat 2018 dan 2019 semangat ya buat kalian.

14. Buat para organisasi yang pernah dan sedang diikuti penulis, terima kasih sudah mengajarkan hal-hal baru dan telah mengajarkan arti dari sebuah pertemanan, kekeluargaan dan kebersamaan.
15. Buat kawan-kawan KKN 01 Huda, Agung, Diana, Mbak Nur, Intan, Fika, Devi, Okta, Jariyah, Anjar, dan Istiqomah.
16. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal sepanjang hidupku.



DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11

BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM FIQH SIYASAH DAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

A. 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	18
a. Pengertian Pemimpin	18
b. Dasar Hukum Pemimpin	20
c. Syarat-Syarat Pemimpin	26
d. Tujuan, Tugas, dan Kewajiban Pemimpin	29
e. Metode Pengangkatan Pemimpin	32
2. Pemilihan Kepala Kampung	35
a. Pengertian Kepala Kampung	35
b. Syarat-Syarat Kepala Kampung	39
c. Pemilihan Kepala kampung	41
d. Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung	46
B. Tinjauan Pustaka	49

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kampung Bumi Ratu	53
B. Keadaan Geografis dan Demografis Kampung Bumi Ratu	55
C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah..... 77
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah..... 80

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 85
- B. Rekomendasi 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara Dengan Informan
- Lampiran 5 Hasil Turnitin
- Lampiran 6 Blangko Konsultasi Skripsi



DAFTAR TABEL

TABEL 1 Sejarah Kepala Kampung Bumi Ratu.....	54
TABEL 2 Jumlah Penduduk Kampung Bumi Ratu Berdasarkan Usia	56
TABEL 3 Daftar Pekerjaan Masyarakat Kampung Bumi Ratu	57
TABEL 4 Jumlah Sarana Pendidikan Kampung Bumi Ratu.	57
TABEL 5 Calon Kepala Kampung Bumi Ratu tahun 2018.....	72



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

Implementasi merupakan terjemahan bahasa inggris yang berasal dari kata Implementation yang artinya pelaksanaan¹. Sedangkan menurut bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan, penerapan².

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksanaan undang-undang³. Maksud peneliti peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk diberlakukan di daerah-daerah atau kampung-kampung agar pelaksanaan peraturan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan harapan pembuat peraturan daerah.

¹ Jhon M. Echolas dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 313.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 529.

³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 190.

Pemilihan adalah Proses, cara, perbuatan memilih⁴. Menurut peneliti pemilihan adalah salah satu cara bagaimana memilih pemimpin agar tidak salah memilih pemimpin untuk kemajuan Negara atau daerah yang dipilih pemimpinnya tersebut.

Kepala Kampung adalah orang yang mengepalai kampung⁵. Menurut peneliti kepala kampung adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah⁶.

Perspektif adalah suatu pandangan atau gambaran dari pendapat atau aturan untuk melihat dan menilai suatu objek yang diteliti.⁷

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri⁸.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 1074.

⁵ Ibid, h. 671.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, h. 4.

⁷ Agus Sulistyono dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta : CV. Surakarta, 2008), h. 273.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Pranamedia, 2014), h. 4.

Jadi, yang dimaksud dari judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah melihat Implementasi dari Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah yang telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan fiqh siyasah karena mayoritas masyarakat adalah penganut Agama Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Obyektif, berdasarkan praktik yang terjadi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tentang pemilihan Kepala Kampung masih adanya penyimpangan dan pelanggaran, sedangkan dalam pemilihan kepala kampung sangat penting karena untuk menentukan nasib kampung itu kedepannya.
2. Secara Subyektif
 - a. Tema tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang pemilihan

kepala kampung” menurut saya sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji

- b. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sehingga saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.⁹ Indonesia sebagai negara yang besar mengedepankan demokrasi sebagai tonggak perjalanan berkehidupan bernegara terhadap rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 1 ayat (2) “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.”¹⁰ Tentunya rakyat memiliki dominasi yang kuat dalam menentukan hak hak demokrasi sesuai dengan konstitusi yang mengatur. Hal ini tentunya

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2006), h. 51.

¹⁰ Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta:2018), h. 4.

merupakan komitmen besaryang nyata diperjuangkan dalam Bergeraknya roda pemerintahan khususnya dalam estafet kepemimpinan yang melibatkan seluruh elemen dan kalangan untuk menyalurkan suaranya yang sah secara hukum mengingat “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹¹ Jadi semua atas kehendak hukum sebagai panglima tertinggi dalam mematuhi kehendak rakyat.

Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana didefinisikan Abraham Lincoln salah satu mantan Presiden Amerika Serikat.¹² Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat yang berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka nantinya. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat atas seperti pemilihan presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkat yang paling bawah seperti pemilihan kepala kampung (pemerintah kampung) tujuannya untuk mencari dan mewujudkan pemerintahan yang berjalan secara

¹¹ Ibid, h. 4.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 220.

demokratis. Pemerintahan kampung selama ini memang menarik untuk dicermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala kampung yang masih dianggap penting sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di kampung karena calon pemimpin desa dipilih secara langsung oleh masyarakat kampung setempat. Kampung atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala kampung, kepala kampung adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kampung. Kedudukan kepala kampung adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan kampung. Kepala kampung dalam urusannya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah suatu lembaga kampung yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat kampung dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintahan kampung termasuk membentuk panitia pemilihan kepala kampung jika masa pemerintahan kepala kampung sudah berakhir. Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayah kampung itu sendiri membuat peran BPK itu sendiri sangat mutlak dan penting. Pasalnya, desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi kampung itu sendiri. Pengangkatan Kepala Kampung sama halnya dengan desa-desa/kampung kampung yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk kampung dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan

pemilihan kepala kampung diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL). Namun, dalam praktek pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang sudah diatur oleh perundang undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan dalam pemilihan kepala kampung (pilkakam) yaitu pemerintahan kampung yang legitimate dan berkualitas. Kearah mana pelaksanaan pemilihan kepala kampung (pilkakam) menentukan sebuah kualitas yang akan terjadi, ini tentunya sesuai dengan bagaimana para pembuat aturan tersebut membentuknya sehingga dapat berjalan bila sejatinya benar benar mengedepankan kedaulatan rakyat tentunya akan menciptakan suatu sistem pemilihan kepala kampung (pilkakam) yang bermartabat, namun sebaliknya jika semata hanya kepentingan tertentu akibat buruk dapat menimpah manusia itu sendiri. Gambaran serta peringatan Allah firmankan dalam Al Quran Surat Ar Ra'd ayat 11 sebagai berikut :

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya :“ Bagi manusia ada malaikat malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran dimuka dan dibelakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. (QS. Ar Ra'd : 11)¹³

Semua tidak terlepas dari sebuah kekuasaan yang memiliki hubungan (*relationship*) bahwa ada suatu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah, satu pihak memberi perintah dan satu pihak yang mematuhi perintah (*the ruler and the ruled*).¹⁴ Semua itu kebutuhan manusia yang sangat penting menjadi kebutuhan tidak terlepas dari sebuah kehidupan, tidak ayal bila menjadi persaingan dan perebutan dalam konstelasi sistem pemilihan pemimpin. Karenanya pula kekuasaan itu adalah kekuasaan politik, dan itu semua sangat rizqan dengan perang kepentingan dalam sebuah perebutan kekuasaan termasuk pembuat aturan bagaimana memiliki celah mewakili golongannya.

Disamping itu juga, penyelenggaraan pemilihan kepala kampung (PilKaKam) juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat kampung sehingga sering kali budaya sangat berperan didalamnya. Seiring hal ini didalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung (PilKaKam) tidak jarang juga menuai kericuhan dan konflik. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pemilihan kepala kampung (PilKaKam). Beberapa konflik yang terjadi setelah sebelum atau sesudah pemilihan kepala kampung (PilKaKam) dikarenakan dari pihak lawan

¹³ Dapertemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan , *Ar Ra'd ayat 11*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 337.

¹⁴ Miriam Budiarto, *Dasar Dasar Ilmu Politik* ,(Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2006), h. 35.

yang dalam hal ini pendukung salah satu calon berusaha menginginkan pasangan yang didukungnya harus menang dan harus memperoleh suara terbanyak inilah yang menyebabkan sebuah konflik dapat terjadi di suatu kampung bahkan sampai perang keluarga yang berakibatkan tewas atau memakan korban. Situasi seperti ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah kampung yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kampung Bumi Ratu yang berada di kecamatan Bumi Ratu Nuban, kabupaten Lampung Tengah dikenal masih sangat *homogen* yang hanya terdapat adat Lampung dan didominasi oleh Agama Islam. Dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan bersinggungan dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat lupa diri akan pentingnya kekeluargaan dan kebudayaan demi kepentingan politik yaitu memenangkan calon meraka masing masing dan berusaha untuk mengalahkan calon yang lain sebagai lawan politiknya. Pemilihan kepala kampung sama hal nya seperti pemilihan pemimpin yang akan menduduki pemerintahan di kampung tersebut.

Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran dalam *al-Quran* dan *Hadits* juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana serta kapan dia berada. Bahkan Islam mewajibkan umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam

suatu negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengyomi masyarakat dalam kepemimpinannya¹⁵.

D. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dari peneliti adalah Kampung Bumi Ratu, kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi fokus sub-sub penelitian adalah proses pemilihan kepala kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

E. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pemilihan kepala kampung di kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratun Nuban Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari persepektif Islam.

¹⁵ A. Dzajuli, *Fiqih siyasah (Implementasi kemaslahatan umat dalam ramburambu syariah)*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2003), h. 59.

- b. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

G. Signifikan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, peneliti mengharapkan dengan adanya skripsi ini bisa digunakan dikalangan masyarakat luas terkhusus dapat digunakan oleh masyarakat Bumi Ratu karena objek dari penelitian yang diambil oleh peneliti adalah di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kegunaan praktis, peneliti mengharapkan dengan adanya skripsi ini bisa membantu memecahkan masalah dan bisa menjadi salah satu bahan ajaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden¹⁶. Data yang diteliti adalah data proses seleksi dan proses pemilihan kepala kampung di kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Hal

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku fiqih dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁷

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁸ Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah masyarakat kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang telah memiliki hak pilih. Adapun jumlah populasi yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah adalah 3.787 populasi.

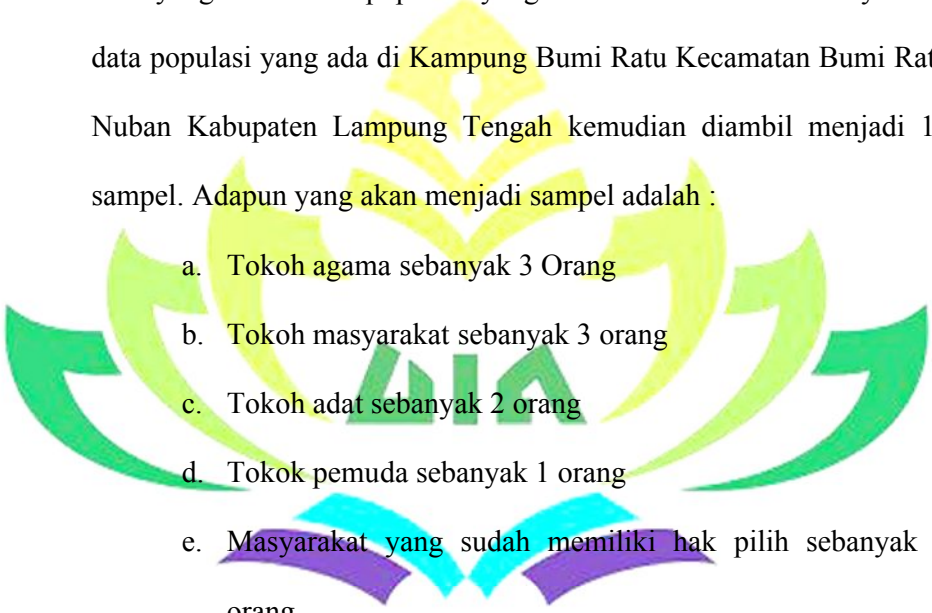
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁹ Tujuan peneliti mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 44.

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 120.

¹⁹ Ibid, hlm 120

dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Dari data populasi yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah kemudian diambil menjadi 15 sampel. Adapun yang akan menjadi sampel adalah :

- 
- a. Tokoh agama sebanyak 3 Orang
 - b. Tokoh masyarakat sebanyak 3 orang
 - c. Tokoh adat sebanyak 2 orang
 - d. Tokok pemuda sebanyak 1 orang
 - e. Masyarakat yang sudah memiliki hak pilih sebanyak 5 orang
 - f. Panitia penyelenggara 1

3. Data dan Sumber data

a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah panitia pelaksana pemilihan kepala kampung, calon kepala kampung dan masyarakat yang ada

²⁰ Ibid, h. 98.

di kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber bahan kajian yang dikemukakan oleh orang atau tokoh yang hadir pada saat terjadinya peristiwa atau tidak mengalami langsung peristiwa itu, seperti buku buku teks.²¹

4. Metodologi Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey.²³ Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah panitia pelaksana pemilihan kepala kampung, calon kandidat kepala kampung dan masyarakat yang ada di kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid terkait tentang

²¹ Ibid, h. 98.

²² Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 83.

²³ Matri Sangarimbun, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1995), h. 192.

pemilihan kepala kampung yang ada di kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁴ Dalam menggunakan metode observasi (pengamatan) cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format format atau blangko pengamatan sebagai instrument²⁵. Yang mana dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu panitia pelaksana pemilihan kepala kampung, calon kepala kampung dan masyarakat yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti namun melalui dokumen²⁶. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung di kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 70.

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014), h. 272.

²⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 170.

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Selain itu juga editing adalah salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan data dilengkapi atau diperbaiki.²⁷

b. Koding

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pra responden kedalam kategori-kategori²⁸. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi kode/tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang

²⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

²⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 154.

kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁹

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.³⁰



²⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 5.

³⁰ Ibid, h. 4.

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM FIQH SIYASAH DAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

A. 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

a. Pengertian Pemimpin

Pengertian pemimpin dalam Islam ada beberapa macam, yaitu : imamah dan khalifah kedua istilah ini yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin¹. Kata imam diambil dari *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari *khalafa*, yang pada mulanya berarti dibelakang. Seringkali juga diartikan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada dibelakang atau datang sesudah yang digantikannya sama halnya pada Khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

At-Tabrasi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa *imam* mempunyai makna yang sama dengan khalifah. Hanya saja kata imam digunakan untuk keteladanan. Didalam Alquran juga sering menggunakan kata imamah dan khalifah, untuk menggambarkan ciri dari seorang pemimpin, sekali didepan untuk menjadi panutan, *Ing ngarso sung tulodo*. Dan didalam arti dibelakang untuk mendorong sekaligus mengikuti kehendak dan arah tujuan yang ditetapkan seorang pemimpin atau *Tut wuri handayani*.

¹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Leadership* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 112.

Para pakar setelah menelusuri Alquran dan hadist menetapkan empat sifat pemimpin yang harus dipenuhi oleh para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umat, antara lain :

1. Ash Shidq, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya.
2. Al-Amanah, atau kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya baik itu dari Tuhan atau dari orang-orang yang dipimpinnya sehingga dalam kepemimpinannya dapat terwujud rasa aman bagi semua pihak.
3. Al-Fathanah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul pada saat kepemimpinan baik persoalan besar atau kecil.
4. Al-Tabligh, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan.²

Didalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 124, diuraikan tentang pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai imamah/pemimpin :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

² Ibid, h. 113.

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya akan akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”, Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “ Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang dzalim ³.

Berdasarkan beberapa pengertian baik dari segi etimologi atau terminologi yang ada di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mencalonkan diri menurut hukum Islam adalah proses atau cara pencalonan seorang pemimpin dimana seorang pemimpin tersebut dianggap mampu dan mumpuni dalam menjalankan dan mengatur kemaslahatan umat dan agama yang bermuara kepada kepentingan akhirat. Tujuan diadakan pencalonan dan pemilihan pemimpin adalah untuk mengurus kehidupan dunia.

b. Dasar Hukum Pemimpin

Pemimpin adalah orang yang pilih oleh umat Islam untuk mengatur urusan-urusan dunia dengan ajaran agama yang diamanahkan untuk melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang baik, amal shaleh, dan perantara yang menyampaikan kepada semua orang⁴.

Kepemimpinan dalam Islam dengan demikian didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al Hadist.Oleh karena itu, sumber dari pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam.Oleh karena itu,

³ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, *Al Baqarah ayat 124*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 23.

⁴ Abdul Mufiz Abdul Sattar, *Sistem pemerintahan dalam Islam* (Jakarta : ter. Tajudin Pogo, Pustaka Ikadi, 2010), h. 4.

ketika berbicara tentang hukum Islam yang tak pernah lepas dari Al-Quran dan Al-Hadist yang memiliki tujuan agar bisa mengatur dan membatasi tingkah laku pemimpin agar bisa lebih baik lagi.

a. Dasar hukum dalam Al-Quran

Dalam surat Al-Baqarah : 30, Allah SWT. Berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁵

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukkan tentang kekhalifahan di muka bumi yang berfungsi sebagai pemimpin terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan lingkungan.

⁵ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, *Al Baqarah ayat 124*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 6.

Dalam surat An-Nisa : 59, Allah SWT. Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶

Dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahwa turunya ayat ini (Q.S An-Nisa : 59) berkenaan dengan ‘Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh nabi Muhammad SAW. Memimpin suatu paksaan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan ringkas dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu’ Abbas. Menurut Imam ad-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu ‘Abbas karena cerita mengenai Abdullahbin Hudzafah itu adalah : “Di saat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalahkan unggun api, dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hamper menerjunkan diri kedalam api”. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah bin Hudzafah saja, sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini sesudahnya, maka

⁶ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, *Al Baqarah ayat 124*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 114.

berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah dalam ma'ruf (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Hudzafah, munasabah disangkut-pautkan dengan alasan turunnya ayat ini, karena dalam kisah itu dituliskan adanya perbatasan antara taat pada perintah (pimpinan) dan menolak perintah untuk terjun kedalam api. Di saat itu mereka perlu akan petunjuk yang harus mereka lakukan⁷.

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan pertama untuk menaati segala perintah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan meninggalkan segala larangannya, kedua kita harus menaati Rasulullah karena Allah telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini, kemudia yang ketiga kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah (ulil amri).

Al-Quran surat An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

⁷. Qamaruddin Shaleh, Dahlan, MD Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* (Bandung : CV. Diponegoro, 1985) hlm. 138

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٢٤﴾

Artinya :” Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”⁸

b. Al-Hadist

Ada beberapa hadist yang menerangkan bahwa memilih pemimpin itu wajib bagi kaum muslimin, diantara sebagai berikut :

Hadits Abudaud

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin”.”⁹

Dari penuturan Abi Hurairah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

⁸. Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, *Al Baqarah ayat 124*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 498.

⁹. Abu Dawud, *Sunan Abu Daud* (Qawait, Dasar Al-Qalam, Terjemahan, 1984) h. 80.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlani dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila terdapat tiga orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin." Nafi' berkata; kemudian kami katakan kepada Abu Salamah; maka engkau adalah pemimpin kami.”.¹⁰

Berdasarkan dari beberapa hadist di atas, bahwasannya memilih pemimpin yang berasal dari Agama Islam atau seorang muslim itu wajib hukumnya, tetapi ada juga dari beberapa ulama menyatakan bahwasannya pemimpin tidak harus dari muslim. Perbedaan dengan pendapat lain, terlihat pada pendapat dibawah ini :

1. Yang diterapkan oleh Ibnu Hazm, Ahlul Sunnah, Murjah, Syiah, dan Khawarij adalah wajib mengangkat pemimpin yang adil, yang akan menegakkan hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya¹¹.
2. Menurut Imam Mawardi : Mengangkat pemimpin bagi orang yang berkecimpung dalam hal ini, ditengah umat wajib berdasarkan ijma'. An nawawi dan ibn Khaldun juga berpendapat demikian.
3. Mengangkat pemimpin wajib berdasarkan akal, menurut pemikiran para uqola untuk taslim kepada pemimpin yang mencegah mereka dan kedzaliman dan mendamaikan dan persilihan dan permusuhan.

Imam Abu Hasal Al-Mawardi menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah artinya yang dituntut untuk menegakkan

¹⁰. Ibid, h 87.

¹¹. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Pramedia, 2014), h. 140.

adalah semua umatnya, jika pemimpin belum tegak ummat selalu dituntut kewajiban ini mereka tidak akan terbebas dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apabila pemimpin tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan umat seluruhnya. Hal itu berarti ummat telah melakukan maksiat dan melalaikan kewajiban penting yang diperintahkan oleh Allah SWT¹².

c. Syarat-Syarat Pemimpin

Dalam Islam memilih seseorang untuk menjadi pemimpin bukanlah hal yang amat sangat gampang karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi seorang pemimpin sebagai berikut :

- a. Adil
- b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum
- c. Sehat indrawi (telinga, mata dan mulut) dan dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- d. Sehat organ tubuh dan cacat yang menghalangnya bertindak dengan sempurna dan cepat
- e. Wawasan yang membuat mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan

¹² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2000), h. 135.

- f. Berani dan berjiwa ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara dan melawan musuh¹³

Selain itu juga ada beberapa syarat menjadi pemimpin yang terdapat dalam Al-Quran yang antara lain sebagai berikut :

1. Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan. Keadilan adalah keseimbangan.
2. Adil. Al-Qur'an menyebut istilah adil dengan tiga term yaitu 'adl, qisth dan haqq
3. Syura. Syura dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.
4. Amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al- munkar. Prinsip dari amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al- munkar adalah suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat.¹⁴

Nasab yaitu kaum Quraisy berdasarkan atas nas-nas dan ijma' para ulama ketika tidak perlu mengubris dhirar yang berpendapat nyeleneh dan membolehkan jabatan imam (khalifah) dipegang oleh kaum non Quraisy, karena Abu Bakar meminta orang *anshor* yang telah membaia Saad bin

¹³. Veitzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Leadership*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h.175.

¹⁴. Muhammad Harvin Zuhdi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam* <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405/413> diunduh Tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 08.24 WIB

Ubaidah untuk mundur dari jabatan imam (khilafah) pada peristiwa saqifah karena berguna dengan sabda nabi Muhammad SAW.

قال رسول الله صلى عليه والسلام: (الأئمة من قريش) رواه أحمد

Rasulullah SAW bersabda: “Kepemimpinan adalah berasal dari bangsa Quraisy.” (HR Ahmad) ”¹⁵

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seseorang pemimpin harus mempunyai kriteria-kriteria yang antara lain cakap dalam bertindak, dalam artian mempunyai pikiran yang beriman tidak dijalankan oleh orang lain, kemudian harus adil kepada masyarakat sehingga rakyat merasa terayomi oleh pemimpin tersebut, lalu seorang pemimpin itu harus sehat jasmani dan rohani agar tidak menghambat aktifitas-aktifitasnya, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat pemberani, artinya seorang pemimpin harus dari golongan laki-laki, kemudian seorang pemimpin itu harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab, yang terakhir seorang pemimpin itu harus memiliki wawasan yang luas untuk mengatur rakyatnya dan harus dari golongan suku Quraisy.

Oleh karena itu, kriteria yang ada dalam Islam salah satunya pemimpin yang harus berasal dari suku Quraisy kalau dikaji lebih dalam lagi bahwa penetapan suku oleh Nabi yang berhak untuk memegang tampuh

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Pranamedia, 2014). h.126.

kepemimpinan itu didasarkan kenyataan bahwa suku Quraisy saat itu yang merupakan suku Arab yang paling kuat, tangguh, dan terkemuka, mereka mempunyai solidaritas yang kokoh dan berwibawa untuk memelihara keutuhan dan kesatuan ummat Islam pada saat itu. Pemimpin yang dari suku Quraisy demikianlah yang mampu mengurus Negara secara efektif dan terstruktur. Akan tetapi, jika ada suku lain terkemuka dan berwibawa maka mereka berhak memegang tampuh kepemimpinan. Dengan demikian, syarat keturunan suku Quraisy itu hanya merupakan sebuah lambang bagi orang-orang yang berpengaruh dalam kualifikasi serta layak untuk memegang jabatan sebuah pemimpin.


d. Tujuan, Tugas, dan Kewajiban Pemimpin

Keberadaan Imamah atau khalifah secara khusus memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijiwai dan dibimbing oleh syariat Islam, sehingga melahirkan seni, budaya, bahkan peradaban yang menjunjung tinggi ajaran Islam.
- b. Terwujudnya keamanan dan stabilitas politik dengan adanya sumber yang sangat terpercaya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.

- c. Terwujudnya keadilan disegala bidang karena kepemimpinan sebagai mandat atau amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada salah seorang hambanya untuk menyampaikannya kepada khalayak ramai.
- d. Terwujudnya masyarakat yang taat kepada Allah, Rasullullah dan pemimpinnya.
- e. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera lahir maupun batin yaitu *baldatun tayyibatun warabbun gafur*.

Ada beberapa tugas dan kewajiban dari seorang pemimpin, diantaranya sebagai berikut :

- 
- a. Membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas-nas yang sudah disepakati serta memberi keleluasaan serta kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang bersangkutan dengan amal masing-masing baik ilmu pengetahuan, baik berupa ibadah ataupun berupa urusan kehidupan.
 - b. Mentanfiskan hukum antara orang yang berselisih atau mendamaikannya.
 - c. Menjaga keamanan umum agar kehidupan segenap rakyatnya terjamin dengan aman dan tentram.
 - d. Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak ada nashnya yang jelas.

- e. Mengatur penjagaan batas-batas negeri dengan kekuatan penuh, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang dapat menolah dari segala bentuk macam ancaman dan serangan musuh yang akan mengganggu keamanan dan ketentraman dalam negeri.
- f. Jihad, melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah sampai pada batas-batasnya yang diizinkan oleh Agama.
- g. Mengatur kemakmuran yang tertera dan yang diizinkan oleh Agama, seperti menyusun baitul mal, perdagangan, dan pertanian.
- h. Hendaknya tidak bekerja sendiri untuk mengamati dan memperhatikan masyarakat dan dapat bergaul dengan semua jenis kalangan masyarakat dan tidak boleh egosi serta tidak boleh bersenang-senang sendiri.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini tentulah hidup bermasyarakat yang mempunyai panutan contoh yang mengatur baik atau buruknya pada suatu bangsa dan Negara atau sekelompok masyarakat itu harus membutuhkan sosok seseorang pemimpin yang bersedia mengatur rakyatnya agar bangsa tersebut aman dan sejahtera.

Menurut pandangan Ibn Khaldun bahwa pemimpin (imamah) adalah tuntutan syariah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia guna mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat karena kemaslahatan akhirat itu lebih utama menurutnya, semua kepentingan dunia harus disesuaikan dengan

hukum syariat agama. Selain itu juga, pemimpin pada hakekatnya menobatkan diri sebagai pengganti Undnag-Undang, memelihara kewibawaan syariat dan mengatur urusan duniawi¹⁶.

e. Metode Pengangkatan Pemimpin

Pengangkatan pemimpin pada masa *khulafa' ar-royidin* ada dua cara. Semuanya pernah dilakukan oleh mereka, dan dua metode tersebut telah disepakati oleh para sahabat pada masa itu tanpa ada yang membantahnya. As Syaikh Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad Damiji dalam buku beliau Imanatul 'Udma 'inda ahlusunnah waljama'ah menjelaskan ada dua metode tersebut yaitu¹⁷:

1. Dipilih *ahlul halli wa 'aqdi*

Cara ini dipakai pada saat pemilihan sahabat Abu Bakar ra. Dan sahabat Ali bin Abi Tholib ra. Dalilnya adalah perkataan Umar ibn Khattab ra. Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahuma* berkata : dikatakan pada Umar, tidaklah enggak memilih (kholifah), Umar berkata : Jika saya memilih, maka telah memilih seseorang yang lebih baik dariku yaitu Abu Bakar, dan jika aku

¹⁶Dedi Supriyadi, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Pustaka setia, 2007), h. 22.

¹⁷. Amru, *Pengangkatan Pemilihan dalam Islam*, [https://annajahsolo.wordpress.com/2009/07/05/pengangkatan-pemimpin-dalam -islam/](https://annajahsolo.wordpress.com/2009/07/05/pengangkatan-pemimpin-dalam-islam/), diakses 24 Oktober 2019 pukul 21.00

tinggalkan, maka telah meninggal (urusan kehilafahan) orang. (HR. Muttafaun ‘Alaihi)¹⁸.

Ahlus Syuro inilah mereka mengatur berbagai permasalahan ummat dalam berbagai masalah dunia dan akhirat. Jika *ahlus syuro* melihat sesuatu masalah sesuai dengan AL-Quran dan Al-Sunnah mereka akan menyetujuinya dan jika tidak sesuai maka akan mereka tolak. Dan termasuk tugas *ahlus syuro* adalah memilih seorang khalifah dan berbagai wuzaranya (menterinya)¹⁹.

2. Metode *Al ‘ahdu* atau *Istihlaf*

Seorang pemimpin memilih penggantinya dari umat Islam yang dia lihat layak untuk menempati kedudukannya. Ketika seorang khalifah merasa bahwa ajalnya telah dekat dia bermusyawarah kepada *ahlul halli wal ‘aqdi* untuk memilih calon penggantinya kemudian. Apabila orang yang direkomendasikan oleh khalifah disetujui *ahlul halli wal ‘aqdi* maka orang tersebut ditetapkan sebagai khalifah setelah wafatnya khalifah tersebut. Hal ini seperti pada masa Bani Umayyah, misalnya, khalifah mengangkat qâdhi pusat, sementara di daerah diserahkan pada penguasa daerah dan hanya diberi

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Pranamedia, 2014), h. 159.

¹⁹. Ibid, h. 160.

wewenang untuk memutuskan perkara, sedangkan untuk pelaksanaan putusan oleh khalifah langsung atau oleh utusannya²⁰.

Sepanjang sejarah Islam dalam hal pengangkatan pemimpin selalu mengacu pada pengangkatan *Khulafaur Arasiyidin*. Pada masa keempat sahabat Rasulullah SAW. Tersebut tidak ada model perebutan suara seperti yang ada pada sistem demokrasi pada hari ini. Abu Bakar ra, Umar ra, Utsman ra, Ali ra adalah contoh bagi umat muslim dalam mengangkat pemimpin dimana mereka tidak haus untuk sebuah jabatan dan kekuasaan. Islam memang tidak memberikan petunjuk sistem apa yang dipakai untuk mengangkat seorang pemimpin karena melihat dari sejarah pengangkatan *Khulafur Arrasidin* memang berbeda-beda cara pengangkatannya. Satu kata kunci pengangkatan *Khulafur Arrasidin* yaitu tidak menyalahi dan tidak melanggar syariat Islam. Setidaknya ada dua metode pengangkatan *Khulafur Arrasidin*, yaitu :

1. Baiat *In'Iqad*, yakni baiat yang menunjukan legalitas orang yang dibaiat sebagai khilafah, pemilik kekuasaan, berhak ditaati, ditolong dan diikuti.

²⁰Siti Zulaikha, *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/177/417>, diunduh Tanggal 1 November 2019 Pukul 16.50

2. Baiat '*Ammah*/ baiat *Tha'ah*, yakni baiat kaum muslim terhadap khalifah terpilih dengan memberikan kekuatan kepadanya. Baiat *Tha'ah* bukanlah untuk mengangkat khalifah karena khalifah sudah ada

2. Pemilihan Kepala Kampung

a. Pengertian Kepala Kampung

Kepala kampung adalah seorang warga kampung yang telah memenuhi persyaratan dan terpilih dengan suara terbanyak dalam suatu pemilihan yang secara khusus diselenggarakan sebagai upaya memilih pemimpin yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bersangkutan²¹.

Kepala kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah²².

Kepala kampung adalah seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat kampung dan diberi kekuasaan oleh rakyatnya untuk mengatur kampung yang menjadi kekuasaannya yang mana orang tersebut mempunyai

²¹. Soewito MD, *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm.51

²². Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, hlm. 2

kredibilitas serta mampu mengarahkan rakyatnya sehingga akan terwujud masyarakat yang tertib, aman, adil, dan makmur sehingga apa yang dicita-citakan masyarakat akan terwujud dan terlaksana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang kampung dan kepemimpinan kampung, menegaskan bahwa kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dengan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada didalam Kabupaten. Pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-Undang ini memberikan dasar menuju suatu komonitas yang mengatur dirinya sendiri.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²³. Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung

²³. Zuhraini, *Hukum Pemerintah Desa*, (Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 13.

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung²⁴. Kampung atau desa menurut Haw Widjaja adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pemerintah Kampung adalah penyelenggara pemerintahan kampung yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.²⁵

Sejak Tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Kampung di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah dari Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 tentang desapraja yang menggantikan perundang-undangan yang di Buat oleh bangsa Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB). Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlaku lagi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis Undang-Undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya Undang-Undang yang

²⁴. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, h. 3.

²⁵. Haw Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonom yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 3.

baru yang mengatur Pemerintah Desa²⁶. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 Pemerintahan desa diatur dengan :

- a. *Inlandsche Gemeente Ordonantie* yang berlaku untuk Jawa dan Madura (Staatblad 1936 Nomor 83. *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Straatblad 1938 Nomor 490 jo Straatbland 1938 Nomor 81).
- b. *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 128 ialah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukai sesuai masing-masing adat kebiasaan setempat.
- c. *Herzein Indonesich Reglement* (HIR) dan *Reglement Indonesia Baru* (RIB) yang isinya mengenai Peraturan tentang Hukum Acara Perdata dan Pidana pada Pengadilan-Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura.
- d. Susudah kemerdekaan peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam

²⁶. Ibid, h .11.

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Rembuk Desa dan sebagainya²⁷.

Memang sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 maka tidak ada peraturan Pemerintah Desa yang seragam di seluruh Indonesia, misalnya ada yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura dan ada pula yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura. Hal ini kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembang ke arah kemajuan yang dinamis. Sulit memelihara persatuan dan kesatuan nasional, sulit memelihara integritas nasional dan sulit untuk pembinaan masyarakat yang bersifat terbuka terhadap pembangunan.

b. Syarat-Syarat Kepala Kampung

Calon kepala kampung adalah penduduk kampung warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

²⁷. Ibid, h. 12.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat ;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung ;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di kampung setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftar ;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dapat mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- k. Berbadan sehat berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
- l. Tidak pernah sebagai kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan ; dan



- m. Bukan sebagai pengurus partai politik ;
- n. Bukan sebagai pengurus BPK ;
- o. Mendapat persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
- p. Bukti lunas dan/atau surat keterangan lunas PBB-P2 ;
- q. Bukti lunas dan/atau surat keterangan lunas PBB-P2 dari Dinas Pendapatan Daerah bagi kepala kampung yang akan mencalonkan diri kembali²⁸.

c. Pemilihan Kepala Kampung

Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan kepala kampung. Pemilihan kepala kampung diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi : (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. (2) pemilihan kepala desa bersifat langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil²⁹.

Dengan azas tersebut maka pemilihan Kepala Kampung memiliki azas yang sama dengan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Adapun pengertian dari azas-azas tersebut adalah sebagai berikut :

²⁸. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, h. 11.

²⁹. A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2016), h. 21


1. Langsung

Rakyat sebagai pemberi hak pilih memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa diwakilkan atau tanpa perantara.

2. Umum

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, rasa, golongan, agama, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

3. Bebas



Setiap warga Negara berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan hak suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan hak suaranya pada surat suara yang telah diberikan oleh panitia dan mencoblos di bilik yang tidak bisa diketahui oleh siapapun.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, panitia penyelenggara, peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum yang terlibat harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Di dalam pemerintahan kampung adanya sebuah fungsi perwakilan dan fungsi kontrol yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan kampung yang dipilih dan diwakili oleh masyarakat kampung. hal ini dilakukan Kepala Kampung kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudan di tingkat Kampung. dasar pemerintahan Kampung yang demokratis adalah pemerintahan yang dibentuk dari bentukan masyarakat kampung sendiri dengan mengakui adanya pembagian 3 kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang menjadi penggerak pemerintahan kampung.

Kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan sehingga kekuatan berasal dari tangan rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada

rakyat. Pemilihan kepala kampung merupakan salah satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik bangsa Indonesia yang dimulai dari tingkat paling bawah. Proses pemilihan umum kepala kampung secara langsung di Indonesia ini didasakan oleh sistem pemilihan kepala kampung dalam pemerintahan tradisional yang berasal dari budaya bangsa Indonesia.

Pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah tertuang dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung. peraturan ini bertujuan agar mewujudkan otonomi kampung yang memberikan kesempatan kepada masyarakat kampung untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.

Jika nanti terpilih dan telah ditetapkan, maka Kepala Kampung mempunyai kewajiban atau tugas yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Menjalankan urusan rumah tangga sendiri ;
- b. Menjalankan urusan pemerintahan diwilayah Kampungnya ;
- c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sandi utama pelaksana pemerintah dan
- d. Pembangunan kampung ;

- e. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- f. Meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
- g. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi ;
- i. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung ;
- k. Menaati dan menegakkan seluruh perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik dan akuntabel ;
- m. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kampung ;
- n. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung ;
- o. Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung ;
- p. Mengembangkan pendapatan masyarakat kampung ;

- q. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
- r. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan melestarikan lingkungan hidup, Kepala Kampung mempunyai fungsi, antara lain :
 - 1. Sebagai penentu arah;
 - 2. Sebagai wakil dan juru bicara masyarakat;
 - 3. Sebagai komonikator yang efektif;
 - 4. Sebagai mediator (perantara);
 - 5. Sebagai integrator (menyatukan masyarakat)³⁰

d. Tata cara pemilihan Kepala Kampung

- a. Berakhirnya masa jabatan kepala kampung

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memberi tahu kepada kepala kampung mengenai akan berakhirnya jabatan kepala kampung secara tertulis 9 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Dalam hal ini BPK memberikan peringatan berupa surat tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala kampung. BPK memproses pemilihan kepala kampung paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala kampung.

³⁰. A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Bee Media Pusta, 2016), h.152.

b. Pembentukan Panitia Pemilihan

Pembentukan panitia pemilihan kepala kampung dibentuk oleh BPK yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perangkat lainnya. Pembentukan panitia tersebut ditulis dalam sebuah berita acara mufakat yang ditandatangani oleh BPK. Adapun panitia pemilihan kepala kampung terdiri dari ketua panitia pemilihan, sekretaris dan anggota.

c. Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon

Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dengan tata cara sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala kampung 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan dengan cara mengumpulkan berkas.
2. Penjaringan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitia mengumumkan penjaringan bakal calon.
3. Ketua panitia menandatangani berita acara penjaringan bakal calon.

Setelah panitia pemilihan kepala kampung melakukan hal tersebut, maka panitia menjaring bakal calon yang memenuhi syarat.

d. Kampanye

Kampanye dalam sistem demokrasi merupakan sebuah fase yang sangat penting di sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum agar masyarakat mengenal dan paham dari seorang calon kepala kampung. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Kampanye politik idealnya berisikan sebuah informasi keunggulan, visi dan misi, program unggulan dari calon kepala kampung yang mengikuti kontestasi politik pemilihan kepala kampung serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekitar.

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara dilakukan pada saat waktu yang telah ditetapkan dari panitia kabupaten. Didalam prakteknya pemungutan suara biasanya dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama dari calon kepala kampung yang mengikuti kontesasi politik atau berdasarkan kebiasaan masyarakat sekitar. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon yang ada pada kotak suara.

Calon kepala kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala kampung yang terpilih. Apabila

terdapat jumlah suara terbanyak yang sama dengan pasangan lainnya maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar³¹. Ini sesuai dengan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015.

B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa referensi pustaka, baik dari buku, jurnal, karya penelitian, maupun sumber online ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, buku-buku tentang Fiqh Siyasah, tata aturan pemerintahan desa serta metode penelitian kualitatif diantaranya, “Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah” karya H.A Djazuli, “Fiqh Siyasah” karya Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam” Karya A. Saibani, “Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa”, Karya Veinthzaln Rivai dan Arvian Arifin, “Islamic Leadership”, Karya Haw Widjaja, “Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh”, dan masih banyak buku lainnya yang dapat menunjang penelitian penulis.

Kedua, karya penelitian yang berhasil penulis temukan adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pikri Rohman (2017) yang berjudul “Sistem

³¹. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, h. 5.

Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif Ketatanegaraan Dalam Islam (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).” Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya : bagaimana sistem pemilihan Kepala Desa (Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya adalah pemilihan Kepala Desa (Peratin) secara hukum Islam sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi peneliti menjelaskan terkait adanya sebuah sistem kampanye yang masih belum sesuai dengan hukum Islam karena pada saat kampanye pemilihan Kepala Desa (Peratin) ditemukan sebuah intimidasi dan adanya sebuah pertentangan yang terjadi pada tim sukses yang sedang mengkampanyekan pasangan yang mereka dukung. Inilah yang membuat sedikit memanas pada saat masa kampanye, akan tetapi pihak panitia dengan cepat berkomunikasi dengan pihak kepolisian sehingga kekeributan yang terjadi bisa teratasi dan tidak merembet kemasalah yang lainnya.

Selain itu juga, ada sebuah penelitian dari Ambar Dwi Prasekti (2012) yang berjudul “ Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukajaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat)”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan

diantaranya : Apa peran tokoh masyarakat terhadap pemilihan Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya adalah bahwa peran dari tokoh tokoh masyarakat dapat menentukan kemenangan seseorang dalam kontensasi pemilihan Kepala Kampung karena tokoh masyarakat itu sudah banyak dikenal orang sehingga eksistensi dari tokoh masyarakat tersebut bisa membantu memenangkan calon Kepala Kampung yang didukung oleh tokoh masyarakat tersebut.

Kemudian ada sebuah penelitian yang berjudul “Pemilihan Kepala Pekon dalam perspektif Islam (Studi Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2011)”. Penelitian ini menarik permasalahan pemilihan Kepala Pekon di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus tahun 2011.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya adalah didalam sebuah proses kampanye terjadi sebuah intimidasi dan sebuah tekanan untuk harus memilih seorang calon Kepala Kampung, apabila tidak memilihnya maka segala bentuk peliharaan maka akan hilang atau dibunuh. Dari hasil tersebut maka seorang atau kelompok yang mendapatkan intimidasi atau tekanan dengan otomatis memilih calon Kepala Kampung tersebut.

Ketiga, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya, jurnal Hukum Al-‘Adalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung seperti “ Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Siti Zulaikha, kemudian ada Jurnal dari berbagai kampus seperti Jurnal “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam” oleh Zuhdi Muhammad Harvin, dan Jurnal “ Pengangkatan Pemilihan dalam Islam” oleh Amru.

Keempat, sumber-sumber online yang relevan dengan penelitian penulis, sebab referensi pustaka tentang Pemilihan Kepala Kampung sudah banyak yang membukukannya.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kampung Bumi Ratu

Berdirinya Kampung Bumi Ratu sebelum tahun 1927 yang dirintis oleh Bapak H. Shaleh, pada saat itu Bumi Ratu masih Menginduk pada Kampung Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan sebagian masih hutan. Bapak H. Shaleh menjabat Kepala Kampung Bumi Ratu tahun 1932 sampai tahun 1940 (selama 8 tahun).Selanjutnya Kepala Kampung periode sampai dengan 1955 dijabat oleh Bapak A. Hamid (Stn. Nyawo Mergo).

Pemilihan Kepala Kampung tahun 1956 dimenangkan oleh Bapak Harun (Pn. Rajo Adat) yang menjabat Kepala Kampung sampai dengan pada tahun 1961. Selanjutnya dilakukan lagi pemilihan Kepala Kampung tahun 1962 yang dimenangkan oleh Bapak Wahab (Penutup) yang menjabat Kepala Kampung Bumi Ratu sampai pada tahun 1963. Selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Kampung lagi pada tahun 1964 dan dimenangkan oleh Bapak Abdullah (Juragan Suttan) sampai dengan selesai jabatannya pada tahun 1966. Kemudian pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu kembali pada tahun 1967 dan dimenangkan oleh Bapak Aziz (Pn. Siraman Gunung) yang menjabat Kepala Kampung Bumi Ratu sampai dengan tahun 1979.

Selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu lagi pada tahun 1980 dan dimenangkan oleh Bapak Yusuf (Stn. Penutup) yang

menjabat Kepala Kampung Bumi Ratu sampai dengan tahun 1989. Selanjutnya pada tahun 1990 dilakukan lagi pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu dan dimenangkan oleh Bapak Bukhari (Sip Stn) yang menjabat Kepala Kampung sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2007 diadakan lagi pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu yang dimenangkan oleh Bapak Hasib Abrori (Penata Stn) yang menjabat Kepala Kampung Bumi Ratu sampai dengan tahun 2010.

Kemudian diadakan kembali pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu pada tahun 2011 dan dimenangkan oleh Bapak Heri Saputra (Pn. Puset Adat) yang menjabat Kepala Kampung sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 dilakukan pemilihan Kepala Kampung lagi dan dimenangkan oleh Bapak Ahmad Yusup Riadi (Stn. Seranggo Nato) dan menjabat Kepala Kampung Bumi Ratu sampai dengan saat ini.

Sejarah Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 1.
Sejarah Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

No	Periode	Nama Kepala Kampung	Ket
1.	1932-1940	H. Saleh	-
2.	1941-1955	Abdul Hamid (Stn Nyawo Mergo)	-
3.	1956-1961	Harun (Pn. Rajo Adat)	-

4.	1962-1963	Wahab (Pentup)	-
5.	1964-1966	Abdullah (Juragan Stn)	-
6.	1967-1979	Abdul Aziz (Pn. Siraman Gunung)	-
7.	1980-1989	M. Yusup ((Stn. Penutup)	-
8.	1990-2006	Bukhari Sapuan (Sip Stn)	-
9.	2007-2010	Hasib Bukhori (Penata Stn)	-
10.	2010-2017	M. Yusup ((Stn. Penutup)	-
11.	2018- Sekarang	Ahmad Yusup Riyadi (Stn. Seranggo Nato)	-

Sumber data : Dokumentasi Kampung Bumi Ratu Tahun 2019

B. Keadaan Geografis dan Demografis Kampung Bumi Ratu

Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah adalah dataran yang memiliki produk unggulan padi yang memiliki karekater Kampung yang berdaya berkembang.

Secara demografis, penduduk Kampung Bumi Ratu 5.348 jiwa, yang terdiri dari rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Laki-Laki 2.688
- b. Jumlah Perempuan 2.660

Jumlah Penduduk Kampung Bumi Ratu dilihat dari usia :

Tabel 2.
Jumlah penduduk Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah

No	Usia	Jumlah
1.	0-17 Tahun	1.210 jiwa
2.	18-56 Tahun	3.259 jiwa
3.	56 keatas	768 jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1.505 kk
5.	Keluarga Pra Sejahtera	322 kk

Sumber data : Dokumen Kampung Bumi Ratu Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan usiayang paling banyak adalah jumlah usia yang berumur 18-56 tahun. Dalam kaitannya dengan pemilihan Kepala Kampung mereka sudah memahami dan mengerti tentang tata cara memilih calon Kepala Kampung yang akan memimpin Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah kedepannya nantinya. Mereka sudah memahami tipikal atau karakteristik calon Kepala Kampung yang mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Kampung.

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, ada beberapa pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 3.
Jumlah pekerja masyarakat Kampung Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Bidan	1
2.	Buruh harian lepas	33
3.	Buruh tani/perkebunan	12
4.	Guru	4
5.	Industri	5
6.	Karyawan BUMN	6

Sumber data : Dokumentasi Kampung Bumi Ratu Tahun 2019

Selanjutnya, jika dilihat dari sarana pendidikan, maka Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sudah memiliki sekolah mulai dari Paud sampai dengan SMP, tetapi untuk SMA belum terdapat di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4.
Jumlah Sarana Pendidikan Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TPA	2 tempat
2.	PAUD	2 tempat
3.	SD	2 tempat
4.	SLTP/MTs	1 tempat
5.	STLA/MA	-

Sumber data : Dokumentasi Kampung Bumi Ratu 2019

Dilihat dari segi luas wilayah, Kampung Bumi Ratu memiliki luas wilayah 1.777 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lahan sawah : 895 Ha
- b. Lahan ladang : 322 Ha
- c. Lahan Perkebunan : 324 Ha
- d. Lahan Perternakan : - Ha
- e. Hutan : - Ha
- f. Waduk/danau/situ : - Ha
- g. Lahan lainnya : - Ha

Orbitrasi jarak Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dari pusat pemerintahan :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 2 KM
- b. Jarak dari Pusat Pemerintah Kabupaten : 15 KM
- c. Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten : 12 KM
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 45 KM

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung

Menurut Bambang Irawan selaku ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu sistem pilihannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia Pemilihan

Menurut Bambang Irawan selaku ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu, pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan perangkat kampung lainnya. Pembentukan panitia tersebut ditulis dalam berita acara musyawarah yang ditanda tangani oleh ketua BPK. Adapun panitia pemilihan Kepala Kampung yang dibentuk terdiri dari ketua panitia, sekertaris, bendahara dan anggota. Apabila masa jabatan Kepala Kampung sudah habis dan anggota BPK belum membentuk panitia pelaksana maka camat yang akan membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung atau juga bisa ditunda sampai enam tahun yang akan dihadap atau periode selanjutnya dan Kepala Kampung akan di berikan kepada pejabat kecamatan atau yang disebut dengan pelaksana tugas¹. Setelah panitia terbentuk maka panitia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun tata tertib;
- b. Penjaringan bakal calon;
- c. Penyaringan bakal calon;
- d. Penetapan nama-nama calon yang berhak ikut pemilihan;

¹. Bambang Irawan, *Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung*, Wawancara riset tanggal 7 November 2019.

- e. Mengawasi jalannya kampanye calon Kepala Kampung;
- f. Melaksanakan pemungutan suara;
- g. Menampung dan menyelesaikan permasalahan serta melaporkannya kepada BPK;
- h. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPK;

Adapun pemilihan Kepala Kampung di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ketua : Bambang Irawan
 Wakil ketua : Usman Hamid
 Sekertaris : Atiek
 Bendahara : Harir Yusuf²

Setelah panitia pemilihan terbentuk maka panitia pelaksana selanjutnya melaksanakan pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung. Pemilihan Bambang Irawan sebagai ketua pelaksana tidak semata-mata begitu saja, akan tetapi Bambang Irawan adalah seorang tokoh pemuda yang masih semangat dan masih peduli terhadap kemajuan Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan dia tidak ingin melihat

². Bambang Irawan, *Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung*, Wawancara tanggal 07 November 2019.

calon Kepala Kampung nantinya tidak melaksanakan tata tertib karena selain masih semangat Bambang Irawan dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa³. Selain itu juga Bambang Irawan selalu taat dalam beribadah, ini yang membuat tokoh agama dengan jelas menunjuknya untuk menjadi ketua pelaksana pemilihan Kepala Kampung⁴.

2. Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon

Menurut Bambang Irawan sebagai ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu, panitia melakukan penjaringan bakal calon dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Panitia pemilihan Kepala Kampung mengumumkan secara terbuka tentang adanya penjaringan bakal calon Kepala Kampung 2 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung dengan cara pengumpulan berkas.
- b. Penjaringan bakal calon Kepala Kampung dilakukan selama 9 hari dengan masa perpanjangan 20 hari dengan ketentuan apabila calon yang daftar kurang dari dua pasang. Apabila ada seorang yang ingin mendaftar sebagai bakal calon Kepala Kampung maka ia harus memenuhi segala persyaratan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun

³. M. Fauzi, *Tokoh Adat Kampung Bumi Ratu*, Wawancara tanggal 12 November 2019.

⁴. Sahmin Ismail, *Tokoh Agama Kampung Bumi Ratu*, Wawancara 12 November 2019.

2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, adapun persyaratan tersebut sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat ;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung ;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di kampung setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendafran ;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dapat mengumumkan secara jujur



dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ;

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- k. Berbadan sehat berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
- l. Tidak pernah sebagai kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan ; dan
- m. Bukan sebagai pengurus partai politik ;
- n. Bukan sebagai pengurus BPK ;
- o. Mendapat persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
- p. Bukti lunas dan/atau surat keterangan lunas PBB-P2 ;
Bukti lunas dan/atau surat keterangan lunas PBB-P2 dari Dinas Pendapatan Daerah bagi kepala kampung yang akan mencalonkan diri kembali.⁵

Setelah proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Kampung yang dilakukan oleh panitia pelaksana, maka terdapat 5 (lima) calon Kepala Kampung yang lolos dari yang mendaftar awal yaitu sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun calon yang

⁵. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, h. 10.

lolos dan maju sebagai calon Kepala Kampung yang akan mengikuti pemilihan Kepala Kampung tahun 2018 sebagai berikut:

1. Ahmad Dasuki Nomor
2. Ahmad Yusup Riyadi Nomor
3. Firdaus
4. Heri Saputra
5. Imron Halim

Setelah melalui proses yang sangat panjang dengan menyeleksi dan memeriksa keabsahan administrasi dari bakal calon Kepala Kampung atas perintah dan mandat dari instansi terkait. Penelitian bakal calon Kepala Kampung dilakukan selama 7 (tujuh) hari. Apabila syarat bakal calon Kepala Kampung tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bakal calon Kepala Kampung diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk dapat melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan penelitian dan penjarangan bakal calon Kepala Kampung, panitia pelaksana pemilihan mengumumkan calon dan nomor urut untuk pencalonan Kepala Kampung :

1. Ahmad Dasuki Nomor 01 (Satu)
2. Ahmad Yusup Riyadi Nomor 02 (Dua)
3. Firdaus Nomor 03 (Tiga)
4. Heri Saputra Nomor 04 (Empat)

5. Imron Halim Nomor 05 (Lima)

3. Pelatihan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan

Menurut pendapat dari Bambang Irawan selaku ketua panitia pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu memang harus dan perlu panitia pemilihan dibekali dan diberi ilmu terkait pemilihan Kepala Kampung ini agar nantinya panitia memahami dan mengerti atas tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dari panitia pemilihan Kepala Kampung itu sendiri. Selain itu juga, pelatihan ini bertujuan agar nantinya tidak salah komunikasi dan salah langkah dalam mengambil keputusan agar nantinya dari keputusan yang mereka ambil tidak merugikan salah satu pihak dan keputusan tersebut bisa membuat situasi dan kondisi keamanan pemilihan Kepala Kampung bisa damai, aman, dan kondusif sehingga bisa mencetak atau melahirkan pemimpin yang berkualitas, amanah dan bertanggung jawab atas jabatan kelak nantinya. Materi yang mengisi materi tersebut adalah dari pihak kecamatan langsung.⁶ Selain itu juga, menurut penuturan Bapak Karnain selaku tokoh masyarakat Kampung Bumi Ratu pelatihan tersebut memang sangat diperlukan agar nantinya panitia bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya dan tidak berlebihan serta tidak salah nantinya mengambil sebuah kesimpulan.⁷

⁶. Bambang Irawan, *Wawancara*, 07 November 2019

⁷. Karnain, *Tokoh Masyarakat Kampung Bumi Ratu*, Wawancara tanggal 12 November 2019

4. Pembuatan seragam panitia

Pembuatan seragam ini dimaksud agar ada sebuah pembeda dari para calon, simpatisan dan masyarakat Kampung agar nantinya panitia pelaksana bisa bekerja secara maksimal tanpa adanya sebuah gangguan dari pihak yang lainnya. Selain itu juga mencerminkan kesiapan dari panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung yang telah terpilih dan mendapatkan amanah dari Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.⁸

5. Bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa

Bekerja sama dimaksudkan agar dari pihak Kepolisian dan TNI bisa membantu mengamankan situasi dan kondisi Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah apabila nantinya terjadi sebuah konflik akibat dari pemilihan Kepala Kampung. Apalagi mengingat Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah adalah Kampung Tua yang masih banyak terdapat tokoh-tokoh adat yang masih mempertahankan dan memberlakukan adat di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah walaupun jumlah masyarakat asli orang Lampung yang ada tidak sebanding dengan pendatang yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung

⁸. Bambang Irawan, *Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu*, Wawancara, 07 November 2019

Tengah. Masyarakat sangat setuju dengan adanya sebuah kerjasama dengan pihak TNI dan POLRI dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung agar masyarakat merasa aman dan tidak mendapatkan sebuah intimidasi dari kelompok yang sedang bertarung dalam pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu⁹.

6. Kampanye

Penyelenggaran kampanye yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dilakukan selama 3 hari massa kampanye. Panitia pemilihan memberikan kesempatan berkampanye kepada masing-masing calon Kepala Kampung melakukan proses berkampanye asalkan tidak melanggar dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, adapun proses kampanye yang dilakukan oleh para calon dan dianjurkan oleh panitia pelaksana, antara lain :

- a. Kampanye penyebaran bahan kampanye kepada umum yang disebarkan di sebanyak 7 dusun yang ada di Kampung Bumi Ratu berupa banner, stiker ataupun dalam bentuk apapun.
- b. Kampanye dengan cara rumah ke rumah (*door to door*) yang dilakukan oleh calon ataupun oleh tim sukses calon Kepala Kampung berupa pengenalan nama, visi dan misi serta program

⁹. Hengky Zulva, *Tokoh Masyarakat Kampung Bumi Ratu*, Wawancara tanggal 12 November 2019

nantinya jika calon tersebut terpilih menjadi Kepala Kampung. Tim sukses mengajak masyarakat agar memilih calon Kepala Kampung yang mereka dukung. Didalam hal ini panitia pelaksana melarang menggunakan cara-cara kekerasan ataupun dengan cara diintimidasi/ditekan, apabila ketahuan maka nantinya panitia akan mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan merugikan calon itu sendiri.

- c. Kampanye dalam bentuk rapat umum atau pertemuan kepada para warga kampung yang dilakukan langsung oleh calon Kepala Kampung untuk berdiskusi atau bertanya jawab kepada calon dari masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan kelak jika nanti calon tersebut terpilih.

Didalam praktek kampanye, panitia selalu menghimbau dan memperingati kepada seluruh calon untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye dan apabila terdapat kerusuhan atau terjadi keributan maka itu adalah tanggung jawab dari para calon Kepala Kampung, karena pelaksana dilapangan itu juga sesuai dari instruksi dari para calon Kepala Kampung¹⁰. Selama masa kampanye semua masyarakat yang memiliki hak pilih tidak pernah mendapatkan sebuah tekanan atau

¹⁰. Bambang Irawan, *Wawancara*, 07 November 2019

paksaan dari tim sukses ataupun dari calon untuk memilih salah satu calon, semuanya berjalan dengan aman dan damai.¹¹

7. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

Panitia pelaksana melalui para calon untuk bisa menertibkan segala bentuk macam alat peraga kampanye yang tertempel atau terpajang sepanjang jalan yang ada di Kampung Bumi Ratu dengan batas waktu selama 3 (Tiga) hari sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung. Panitia mengingatkan kepada para calon agar menertibkan alat peraga kampanye selama waktu tersebut dan menghentikan segala macam bentuk kampanye terkait adanya pemilihan kepala kampung. Selama masa penertiban alat peraga kampanye tidak ada masalah yang timbul dan membuat para calon sendiri yang menertibkan alat peraga kampanye beserta tim sukses ini menunjukkan adanya sebuah kedewasaan calon pemimpin Kampung Bumi Ratu.¹²

8. Panitia Berkeliling Kerumah para Calon Kepala Kampung

Menurut penuturan dari ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung membuat sebuah aturan yang telah disepakati para calon yang ketua tim pemenangan bahwasannya apabila terjadi sebuah kerusakan

¹¹. Mardiyah, Nona, Lela Wati, Eka Putra, Mamad, *Masyarakat yang Memiliki Hak Pilih*, Wawancara tanggal 12 November 2019.

¹². Abu Yasid, *Tokoh Masyarakat Kampung Bumi Ratu*, Wawancara tanggal 12 November 2019

yang dilakukan oleh para tim sukses maka itu merupakan tanggung jawab penuh dari calon Kepala Kampung. Hal tersebut dilakukan oleh para panitia agar dalam massa tenang tidak ada tim sukses yang melakukan tindak kekerasan atau intimidasi kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk memilih calon yang mereka dukung. Peraturan tersebut di sambut baik oleh para masyarakat Kampung Bumi Ratu Karena atas pelaksanaan peraturan tambahan tersebut warga mengaku keamanan mereka terjaga dengan baik oleh para panitia, selain itu juga mereka yang telah memiliki hak pilih akan memberikan hak pilih mereka sesuai dengan hati nuraninya yang tidak terintimidasi oleh para tim sukses calon Kepala Kampung. Dalam hal ini panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung ingin mewujudkan pemilihan yang terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung dan sesuai dengan syariat Islam¹³. Berkelilingnya panitia kerumah para calon Kepala Kampung ini sangat baik sekali karena panitia mampu meredam dan menenangkan warga terkait jika ada sebuah isu yang bisa membuat perpecahan umat yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.¹⁴

¹³. Bambang Irawan, *Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu*, Wawancara tanggal 07 November 2019

¹⁴. Aziz Rohman, *Tokoh Agama Kampung Bumi Ratu*, Wawancara Tanggal 12 November 2019

9. Breafing/rapat persiapan Seluruh Panitia Menjelang Pencoblosan

Breafing atau rapat persiapan yang selalu dilakukan oleh para panitia pemilihan Kepala Kampung bertujuan agar semua panitia bisa memahami segala tugas yang akan mereka kerjakan dan tidak terjadi sebuah salah komunikasi antar sesama panitia yang bisa berakibat fatal. Ernani selalu tokoh adat perempuan (towalo anau) sangat senang dengan melihat kinerja dari panitia penyelenggara pemilihan Kepala Kampung, mereka sangat berhati-hati dalam bertindak dan bersikap agar tidak melanggar dan bersinggungan dengan agama dan adat yang berlaku di Kampung Bumi Ratu¹⁵.

10. Pemungutan Suara

Tahap pemungutan suara dimulai dan dilaksanakan sesuai dengan arahan dari panitia kecamatan dan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitia mengumumkan tanggal pencoblosan yang dibantu oleh para kadus untuk memberikan surat undangan panggilan untuk mencoblos dari rumah ke rumah. Sebelum berlangsungnya pemilihan Kepala Kampung panitia harus mempersiapkan perlengkapan proses pemungutan suara mulai dari surat suara, kotak suara dan tempat pemungutan suara. Dalam hal ini, tempat pemungutan suara ditempatkan di balai desa Kampung Bumi Ratu dengan pencoblosan dilakukan dengan

¹⁵. Ernani, *Tokoh Adat Perempuan Kampung Bumi Ratu*, Wawancara tanggal 12 November 2019

sesuai dusun dan diangkut melalui armada yang telah disediakan oleh para panitia pemilihan Kepala Kampung.

Daftar mata pilih yang terdaftar pada panitia pelaksana adalah 3753 mata pilih. Akan tetapi dari 3753 mata pilih yang ada, yang hadir dan memberikan hak suaranya hanya 3357 mata pilih saja. Besarnya mata pilih yang tidak hadir dan memberikan hak suaranya dikarenakan mata pilih banyak di perantauan.

Didalam proses pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah di menangi oleh pasangan dengan nomor urut 2 atas nama Ahmad Yusuf Riyadi dengan menghasilkan suara sebanyak 1178 suara. Hal ini dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 5.

Jumlah penghitungan suara pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

No	Calon Kepala Kampung	Keterangan	Jumlah Suara	Persentase
1	Ahmad Dasuki	No. Urut 1	58	1,2%
2	Ahmad Yusup Riyadi	No. Urut 2	1750	52,8%
3	Firdaus	No. Urut 3	64	1,9%
4	Heri Saputra	No. Urut 4	1057	30,9%
5	Imron Halim	No. Urut 5	359	10,2%
6	Suara Rusak		69	2,2%

Sumber data : Dokumentasi Pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu tahun 2019

Tabel diatas adalah hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu tahun 2018 dan dimenangkan oleh Ahmad Yusup Riyadi dengan memperoleh suara sebanyak 1750 suara atau 52,8% dari seluruh total suara sebanyak 3357 suara.

Pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu dalam proses pelaksanaannya susah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung dan sudah sesuai dengan syariat Islam.

11. Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih

Seselesainya dari proses pencoblosan Pemilihan Kepala Kampung panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung langsung menetapkan calon terpilih yaitu Ahmad Yusup Riyadi dan juga membuka peluang bagi seluruh calon untuk mengajukan gugatan atas hasil dari pemilihan Kepala Kampung dan dari setiap calon menerima hasil dari pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu. Panitia langsung mengumumkan penetapan calon terpilih Karena panitia pemiliha Kepala Kampung menutup kemungkinan jika akan terjadinya sebuah aksi atau penyerangan akibat hasil dari pemungutan suara¹⁶.

¹⁶. Bambang Irawan, *Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung*, Wawancara tanggal 07 November 2019

12. Pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih

Setelah proses panjang yang dilalui oleh para panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung maka pada tanggal 27 Desember 2018 dilaksanakan pelantikan bersama Kepala Kampung yang ada di Lampung Tengah dan terhitung sejak tanggal tersebut maka tongkat kepemimpinan Kepala Kampung Bumi Ratu resmi dipegang oleh Ahmad Yusup Riyadi. Ahmad Yusup Riyadi mengabdikan sepenuh dirinya untuk Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan akan merealisasikan program kerja yang telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat Bumi Ratu dengan melaksanakan jargon sewaktu pemilihan Kepala Kampung yaitu HANDAL (yang memiliki arti Harmonis, Nyaman, Damai, Proporsional dengan mengedepankan peningkatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan meratakan pembangunan baik dari Dusun 01 (satu) sampai dusun 07 (tujuh))¹⁷. Selain itu juga Ahmad Yusup Riyadi berpesan kepada seluruh masyarakat Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk selalu bersama-sama dengan dirinya dalam membangun Kampung Bumi Ratu, dirinya siap menerima segala macam saran dan kritikan dari masyarakat kepada dirinya agar dirinya bisa lebih belajar lagi dan bisa memaksimalkan melaksanakan amanah dan tanggung jawab

¹⁷. Ahmad Yusuf Riyadi, *Kepala Kampung Terpilih Bumi Ratu*, Wawancara tanggal 07 November 2019

sebagai Kepala Kampung Bumi Ratu sampai dengan masa jabatannya habis nantinya¹⁸. Didalam kepemimpinan kepala Kampung Baru ini, Heri Suhardi Jaya selaku tokoh pemuda Kampung Bumi Ratu sangat berharap kepada Kepala Kampung yang baru agar selalu mengajak pemuda turut andil dalam pembangunan yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah¹⁹.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah panitia pelaksana, tokoh adat dan masyarakat memberikan sebuah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah agar dalam proses pemilihan Kepala Kampung yang akan dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat memberlakukan aturan khusus terhadap Kampung-Kampung tua (Kampung yang masih ada orang Lampung asli dan masih menggunakan adat dan kebiasaan orang Lampung) karena di dalam pemilihan Kepala Kampung yang nantinya akan memimpin Kampung tersebut di harapkan yang akan menjadi calon itu adalah masyarakat pribumi/masyarakat Lampung asli yang masih mendiami dan menempati Kampung tersebut, hal itu dikarenakan yang

¹⁸. Ahmad Yusuf Riyadi, *Kepala Kampung Terpilih Bumi Ratu*, Wawancara tanggal 07 November 2019.

¹⁹. Heri Suhardi Jaya, *Tokoh Pemuda Kampung Bum Ratu*, Wawancara tanggal 12 November 2019

paham tentang kebiasaan, kebudayaan dan aturan Lampung adalah masyarakat Lampung itu sendiri dan bukan penduduk pendatang apalagi bukan dari suku Lampung asli melainkan berasal dari luar suku Lampung. Apabila peraturan tersebut masih diberlakukan dan tanpa diubah khusus untuk masyarakat Kampung tua maka itu akan mengakibatkan konflik dalam hal ini akan terjadinya sebuah perang saudara yang akan terjadi di Kampung tua tersebut, apabila terjadi peperangan maka akan jatuh korban jiwa dan bisa mengakibatkan dampak yang negatif bagi Masyarakat Kampung tersebut, merugikan Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung. Akan tetapi, yang berasal dari bukan asli suku Lampung bisa mengikuti pemilihan Kepala Kampung tetapi dengan cara harus me-Lampungkan dirinya terlebih dahulu dan harus mendapatkan izin dari tokoh adat dan harus mengikuti tahap demi tahap untuk me-Lampungkan dirinya.²⁰

²⁰. M. Fauzi, Karnain, Sahmin Ismail, Bambang Irawan, *Wawancara*, Tanggal 12 November 2019

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 dalam Proses Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Bukan hal yang jarang lagi pada pemilihan kepala kampung berujung pada konflik baik konflik pribadi ataupun konflik keluarga yang disebabkan oleh tidak terimanya calon kepala kampung yang kalah pada saat pemilihan kepala kampung. Konflik yang terjadi bahkan tidak memandang bulu, artinya siapapun bisa terlibat termasuk orang masih memiliki hubungan kekerabatan.

Kepala Kampung yang terpilih tentunya bisa meredam bahkan harus menyelesaikannya agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, dan bisa melaksanakan program kerja yang berdampak bagi kemajuan kampung itu tersendiri. Proses pemilihan Kepala Kampung tentu saja merupakan proses yang tidak perlu dipermasalahkan kedudukannya sejauh dalam pelaksanaannya tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sebab, proses pemilihan Kepala Kampung adalah proses memilih seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin didesa tersebut menuju yang lebih baik lagi. Memilih pemimpin itu wajib bagi masyarakat kampung agar nantinya pemimpin yang dipilih tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Kampung diberbagai daerah di Indonesia memang masih perlu dikaji lebih dalam lagi karena dalam proses pemilihan kepala kampung cenderung melakukan segala hal demi untuk menang dalam pemilihan Kepala Kampung. Seperti halnya dikampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dimana dalam perebutan Kepala Kampung banyak hal dilakukan oleh tim sukses Kepala Kampung. Perebutan tersebut karena masyarakat di Kampung masih dalam bentuk pemerintahan kecil jadi sangat rawan terjadi konflik antar saudara dan adat setempat. Perebutan tersebut seperti memaksa saudara untuk mendukung dan memilih calon Kepala Kampung dan begitu juga dengan tarik menarik dari anggota adat istiadat.

Pemilihan Kepala Kampung yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung sudah berjalan dengan baik dan berlangsung sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan tidak ada keseteruan atau perdebatan atau perkelahian yang terjadi saat penjaringan, penyaringan, kampanye, pemilihan suara, penghitungan suara dan penetapan calon terpilih berjalan secara lancar dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah panitia pelaksana, tokoh adat dan masyarakat memberikan sebuah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah agar dalam proses pemilihan Kepala Kampung yang akan dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat memberlakukan aturan khusus terhadap Kampung-Kampung tua (Kampung yang masih ada orang Lampung asli dan masih menggunakan adat dan kebiasaan orang Lampung) karena di dalam pemilihan Kepala Kampung yang nantinya akan memimpin Kampung tersebut di harapkan yang akan menjadi calon itu adalah masyarakat pribumi/masyarakat Lampung asli yang masih mendiami dan menempati Kampung tersebut, hal itu dikarenakan yang paham tentang kebiasaan, kebudayaan dan aturan Lampung adalah masyarakat Lampung itu sendiri dan bukan penduduk pendatang apalagi bukan dari suku Lampung asli melainkan berasal dari luar suku Lampung. Apabila peraturan tersebut masih diberlakukan dan tanpa diubah khusus untuk masyarakat Kampung tua maka itu akan mengakibatkan konflik dalam hal ini akan terjadinya sebuah perang saudara yang akan terjadi di Kampung tua tersebut, apabila terjadi peperangan maka akan jatuh korban jiwa dan bisa mengakibatkan dampak yang negatif bagi Masyarakat Kampung tersebut, merugikan Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung. Akan tetapi,

yang berasal dari bukan asli suku Lampung bisa mengikuti pemilihan Kepala Kampung tetapi dengan cara harus me-Lampungkan dirinya terlebih dahulu dan harus mendapatkan izin dari tokoh adat dan harus mengikuti tahap demi tahap untuk me-Lampungkan dirinya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Proses pemilihan Kepala Kampung tentu saja merupakan proses yang tidak perlu dipermasalahkan kedudukannya sejauh dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terdapat masalah-masalah atau penyimpangan yang melanggar ketentuan dari perundang-undang yang berlaku. Sebab pemilihan Kepala Kampung adalah proses memilih seseorang pemimpin yang nantinya akan memimpin kampung tersebut menuju yang lebih baik lagi. Memilih pemimpin adalah kewajiban bagi suatu masyarakat dan juga dalam masyarakat Islam.

Sepanjang sejarah Islam dalam hal pengangkatan pemimpin selalu mengacu pada pengangkatan *Khulafaur Arasiyidin*. Pada masa keempat sahabat Rasulullah SAW. Tersebut tidak ada model perebutan suara seperti yang ada pada sistem demokrasi pada hari ini. Abu Bakar ra, Umar ra, Utsman ra, Ali ra adalah contoh bagi umat muslim dalam mengangkat pemimpin dimana mereka tidak haus untuk sebuah jabatan dan kekuasaan.

Islam memang tidak memberikan petunjuk sistem apa yang dipakai untuk mengangkat seorang pemimpin karena melihat dari sejarah pengangkatan *Khulafur Arrasidin* memang berbeda-beda cara pengangkatannya. Satu kata kunci pengangkatan *Khulafur Arrasidin* yaitu tidak menyalahi dan tidak melanggar syariat Islam. Setidaknya ada dua metode pengangkatan *Khulafur Arrasidin*, yaitu :

1. Baiat *In'Iqad*, yakni baiat yang menunjukkan legalitas orang yang dibaiaat sebagai khalifah, pemilik kekuasaan, berhak ditaati, ditolong dan diikuti.

2. Baiat *'Ammah/* baiat *Tha'ah*, yakni baiat kaum muslim terhadap khalifah terpilih dengan memberikan kekuatan kepadanya. Baiat *Tha'ah* bukanlah untuk mengangkat khalifah karena khalifah sudah ada.

Al-Quran telah memberi petunjuk kepada umat manusia bahwa manusia pada dasarnya sangat berpotensi terjadinya konflik jika tidak didasari dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَحْنُ نُسُجُۙحٌ نَّحْمَدُكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ

أَعْلَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya mempunyai potensi yang besar untuk melakukan konflik hingga membawa kepada pertumpahan darah atau peperangan sebagaimana yang terjadi di muka bumi pada hari ini.

Melihat proses pemilihan Kepala Kampung di Kampung Bumi Ratu memang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam terbukti dengan proses terhadap pemilihan Kepala Kampung sebagaimana Islam mewajibkan pengangkatan pemimpin dari suatu komunitas baik Negara atau organisasi pemerintahan yang paling kecil (Kampung). Kampung Bumi Ratu telah melaksanakan pemilihan Kepala Kampung pada Tahun 2018 maka dari itu Kampung Bumi Ratu sejalan dengan Islam tentang arti pentingnya seorang pemimpin yang akan mengayomi masyarakat untuk membuat kampung dan masyarakat kampung lebih baik lagi kedepannya. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat Kampung Bumi Ratu pada pemilihan Kepala Kampung.

Pemilihan pemimpin dalam proses pengangkatannya dibentuk *ahl al-hall wa al-'aqd* lembaga ini fungsinya untuk mengawal pengangkatan pemimpin. Memang dalam Islam metode dari pengangkatan seorang pemimpin itu tidak pasti dan berubah-ubah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat dan pada saat itu. Adalanya lembaga *al-hall wa al-'aqd* bertujuan untuk menyeleksi bakal calon yang akan maju untuk jadi pemimpin dan mengawal jalannya pemilihan tersebut.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *al-hall wa al-'aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan gagasan tentang *al-hall wa al-'aqd* dengan mengkombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *al-hall wa al-'aqd* menurut al-Anshari dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilihan umum ini, anggota masyarakat sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *al-hall wa al-'aqd* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *al-hall wa al-'aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpendang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki

perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *al-hall wa al-'aqd*.

3. Di samping itu, ada juga anggota *al-hall wa al-'aqd* yang diangkat oleh kepala Negara.

Senada dengan point diatas, pemilihan Kepala Kampung yang ada di Kampung Bumi Ratu, dimana pada saat pemilihan Kepala Kampung dari awal sudah dibentuk panitia pemilihan Kepala Kampung guna untuk mengawal pemilihan pemilihan Kepala Kampung dimulai dari penjurangan bakal calon, seleksi berkas, kampanye, pemungutan suara samapi dengan penetapan calon Kepala Kampung terpilih. Hal ini sangat jelas dengan bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat Kampung Bumi Ratu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian terkait judul skripsi Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung yang ada di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung dari tahap yang paling awal yaitu pemilihan panitia pelaksana, penjurian, penyaringan bakal calon Kepala Kampung, seleksi bakal calon Kepala Kampung, penetapan calon Kepala Kampung, kampanye, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Kampung terpilih sudah sangat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
2. Pandangan/tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pemilihan Kepala Kampung yang ada di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan tidak ada perdebatan yang ada dan

menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan perintah yang ada didalam Al-Quran dan Al-Hadist dan berjalan dengan aman, damai, tentram dan bisa dibuktikan dari Hukum Islam.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi diberikan kepada :

1. Kepada Bupati Kabupaten Lampung Tengah, agar Bupati Lampung Tengah bisa merekomendasikan untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang pemilihan Kepala Kampung khusus untuk Kampung yang masih ada masyarakat Lampung asli/pribumi agar kedepannya tidak terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan.
2. Kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah, agar DPRD Kabupaten Lampung Tengah bisa membuat sebuah Peraturan Daerah tentang pemilihan Kepala Kampung khusus untuk Kampung yang masih ada masyarakat Lampung asli/pribumi agar kedepannya tidak terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan.
3. Kepada masyarakat, agar dapat mengikuti Peraturan Dearah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Buku

Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2000.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014

At-Thayyib, *Al-Quran Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Perkata*, Bekasi : Cipta Bagus Segera : 2012

Budiardjo, Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemah*, Surabaya, C.V Pustaka Agung Harapan, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* Jakarta : Balai Pustaka, 2002

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003.

Echolas, M, Jhon, Hasan, Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta, Prenamedia Group, 2014.

MD, Soewito, *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*, Bandung : Nuansa Aulia, 2007

Narbuko, Narbuko, Abu, Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Rivai, Veinthaln dan Arvian Arifin, *Islamic Leadership*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013

Saibani, A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bee Media Pustaka, 2016.

Sattar, Abdul Mufiz Abdul, *Sistem pemerintahan dalam Islam*, Jakarta : ter. Tajudin Pogo, Pustaka Ikadi, 2010

Sangarimbun, Masri, Sofian, Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1995.

Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2018

Shaleh, Qamaruddin, Dahlan, MD Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Bandung : CV. Diponegoro, 1985

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sulistyo, Agus, Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surakarta CV. Surakarta, 2008

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Widjaja, Haw, *Otonomi Desa : Merupakan Otonom yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Zuhraini, *Hukum Pemerintah Desa, Lampung* : CV. Anugrah Utama Raharja, 2013

Jurnal

Amru, *Pengangkatan Pemilihan dalam Islam*,
<https://annajahsolo.wordpress.com/2009/07/05/pengangkatan-pemimpin-dalam-islam/>

Zuhdi, Muhammad Harvin, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*
<http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405/413>.

Zulaikha, Siti, *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/177/417>,

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung.

Wawancara

Abu Yasid, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 07 November 2019

Ahmad Yusuf Riyadi, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 07 November 2019

Aziz Rohman, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 07 November 2019

Bambang Irawan , Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 07 November 2019

Eka Putra, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 07 November 2019

Ernani, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 08 November 2019

Hengky Zulva , Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 08 November 2019

Heri Suhardi Jaya, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 08 November 2019

Karnain, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 08 November 2019

Lela Wati, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 10 November 2019

M. Fauzi , Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 10 November 2019

Mamad, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 10 November 2019

Mardiah, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 10 November 2019

Nona, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 10 November 2019

Syahmin Ismail, Wawancara dengan penulis, Kampung Bumi Ratu 10 November 2019